

ABSTRAK

Revinola Dianeztika, *Perlindungan Hak Transgender Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*

Secara hukum, transgender telah digambarkan eksistensinya dengan *different culture* yang dianggap tindakan kriminal oleh sebagian aparat penegak hukum. Dalam perspektif HAM secara individu mereka dilindungi hak-haknya, namun dalam sistem peradilan pidana memiliki kedudukan yang berbeda terutama dalam sistem masyarakatan. Terdapat beberapa aspek dalam sistem pemidanaan yang tidak dapat dinikmati hak-haknya oleh kelompok transgender. Faktanya terdapat kasus transgender seperti Lucinta Luna dan Intan Florensia yang ditempatkan dalam satu sel bersama narapidana perempuan, sehingga mengakibatkan kerentanan penyimpangan seksual bahkan perilaku subordinatif.

Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk menganalisis problematika transgender dalam sistem peradilan pidana. Kedua, untuk menganalisis eksistensi kelompok transgender sebagai subjek hukum di lembaga masyarakatan. Ketiga, untuk menganalisis konsep perlindungan hak transgender dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran diantaranya adalah teori keadilan sebagai *grand theory* yang membahas persamaan hak sesuai dengan proposionalnya, *middle theory* yang digunakan ialah teori hak asasi manusia dengan mengkaji turunan hak atas perlindungan, dan *apply theory* menggunakan teori sistem peradilan pidana didalamnya membahas tentang pelaksanaan hukuman pidana transgender di lembaga masyarakatan.

Metode penelitian ini mengadopsi deskriptif analisis dengan penelitian hukum yuridis normatif. Kemudian dianalisis melalui peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak transgender dengan pendekatan studi kasus, yaitu meneliti beberapa kasus tertentu yang masuk kategori diskriminasi berbasis gender terhadap kelompok transgender dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal berikut: Berbagai problematika telah terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang secara khusus dibuat untuk mengkondisikan hak transgender pada sistem peradilan pidana. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan hanya mengenal dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga belum ada aturan pemberian sel khusus bagi transgender yang terlibat dalam kasus hukum. Lembaga masyarakatan dalam menjalankan fungsi putusan pengadilan harus memastikan hak terpidana transgender terlindungi, agar terhindar dari stereotip negatif dan pelanggaran berbasis gender. Hingga saat ini, advokasi terus dilakukan oleh individu transgender untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dalam menjamin perlindungan hukum, maka diperlukan penafsiran progresif maupun interelasi dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Hak, Transgender, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Revinola Dianeztika, *Protection of Transgender Rights in the Criminal Justice System in Indonesia.*

Legally, transgender people have depicted their existence with a different culture that is considered a criminal act by some law enforcement officials. From an individual human rights perspective they are protected by their rights, but in the criminal justice system they have different positions especially in the penitentiary system. There are some aspects of the system that transgender people cannot enjoy their rights. In fact, there are cases of transgender people such as Lucinta Luna and Intan Florensia being placed in one cell with female inmates, resulting in vulnerability of sexual deviance and even subordinate behavior.

The aim of this research is to develop a First, to analyze transgender problems in the criminal justice system. Second, to analyze the existence of transgender groups as legal subjects in prisons. Third, to analyze the concept of protecting transgender rights in the Indonesian criminal justice system.

This study uses a framework of thought including the theory of justice as a grand theory which discusses the equal rights in accordance with its propositional, the middle theory used is theory of human rights with reviewing the derivative of right to protection, and apply theory using the theory of criminal justice system in which it discusses the implementation of criminal punishment transgender people in a penitentiary.

This research method adopts a descriptive analysis with normative juridical law research. Then analyzed through legislation related to the protection of transgender rights with the Case Study, which examines certain cases that fall into the category of gender discrimination against transgender in the Indonesian criminal justice system.

The results showed the following: Various problems have occurred due to the absence of a rule of law specifically created to condition transgender rights in the criminal justice system. In Law No. 12 of 1995 on Correctional Services only recognized two sexes of men and women, so there is no rules special cell regulation for transgender people involved in legal cases. Correctional institutions in carrying out the function of court decisions must ensure the rights of transgender convicts, are protected to avoid negative stereotype and gender based offence. Until now, advocacy continues to be conducted transgender individuals to strike a balance between efficiencies in ensuring legal protection, is required from interpretation and interrelation from law enforcement officials in the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Rights, Transgender, Criminal Justice System